

Memperkuat Kapasitas Lembaga Riset Kebijakan

Kemitraan antara Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Cakra Wikara Indonesia (CWI)

Utilisasi Hasil Penelitian terhadap Perubahan Kebijakan Publik

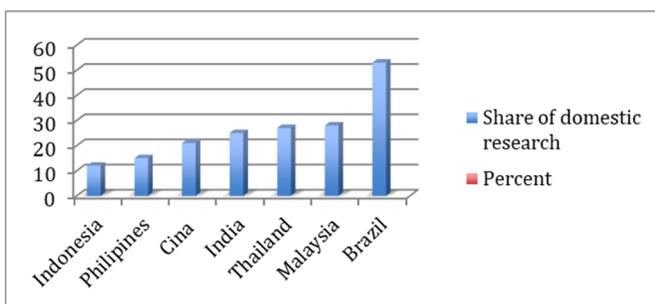


Diagram 1.1 Share of Domestic Research (%) The numbers show the share of published research on a particular country done by researchers based in the country. Source: SSCI database, 1956 to 2011.¹

Jurnal peer review merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan sejauh mana hasil karya riset peneliti suatu negara, diakui keberadaannya sebagai karya ilmiah. Di Indonesia, hasil karya ilmiah peneliti Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Data dari *The Social Sciences Citation Index (SSCI)* menunjukkan bahwa hanya sekitar 12% publikasi penelitian ilmu sosial tentang Indonesia yang dilakukan oleh penulis yang berbasis di Indonesia, yang mana jumlah itu kurang dari separuh angka untuk Thailand dan Malaysia (lihat Diagram 1.1).

Masih relatif rendahnya karya penelitian tersebut setidaknya disebabkan oleh empat hambatan sebagai berikut:

1. Kualitas riset hasil yang masih rendah seiring rendahnya pengkomunikasian hasil-hasil riset (hanya berhenti di rak buku perpustakaan) tidak sampai ke pembuat kebijakan atau pun ke publik.
2. Rendahnya pendanaan riset, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Sebagai gambaran perbandingan, pendanaan riset di Indonesia hanya 0,09% sedangkan misalnya di Korea lebih dari 20%. Di Indonesia dari 0.09% itu, 80% nya dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan di negara-negara lain 80% dilakukan oleh sektor swasta (bisnis).
3. Rendahnya inisiatif untuk pengelolaan pengetahuan, aliran informasi dan aliran data, bahkan kadang masih terbelenggu oleh persoalan sumber dana siapa yang akan digunakan.
4. Masih lemahnya wacana publik karena data-data hasil riset tidak tersampaikan ke publik, dan sebaliknya permintaan-permintaan hasil riset atau pun produk sektor pengetahuan lainnya masih rendah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah bersama dengan lembaga donor yang berfokus pada sektor pengetahuan, bekerja sama melakukan berbagai upaya agar jumlah dan kualitas karya ilmiah peneliti di Indonesia bisa memenuhi standar jurnal ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

RINGKASAN KEMITRAAN

Dalam upaya mencapai tujuan meningkatkan taraf kehidupan rakyat Indonesia melalui proses pembuatan kebijakan publik yang lebih berkualitas dengan menggunakan penelitian, analisis dan bukti secara lebih baik, pemerintah Australia dan Indonesia membentuk sebuah kerja sama yang diberi nama: Knowledge Sector Initiative (KSI), sebuah program kemitraan untuk memperkuat kapasitas lembaga riset kebijakan dalam menghasilkan penelitian berkualitas tinggi yang mampu berperan mendorong proses pembuatan kebijakan publik berbasis bukti (*evidence based*).

KSI fase 1 berlangsung pada tahun 2013-2017 dengan menitikberatkan pada pembenahan lembaga-lembaga riset

kebijakan. Secara bertahap 16 lembaga riset dipilih oleh KSI untuk menjadi mitra dengan menerima program pemberian hibah Dana Inti (*Core Funding*). Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas lembaga riset kebijakan melalui pengembangan organisasi, peningkatan kualitas dan komunikasi penelitian. KSI juga mendukung mitra lembaga riset melalui *peer review* artikel jurnal dan *peer support* dalam menjalankan proposal penelitian. Salah satu mitra KSI fase 1 adalah Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia. Hasil kemitraan KSI dan Puskapol di fase 1 meliputi: pengembangan kapasitas lembaga yang mencakup penulisan dokumen rencana strategis lembaga, mendorong hasil riset untuk advokasi kebijakan, komunikasi penelitian, serta peningkatan kualitas produksi penelitian dan manajemen.

Saat ini KSI tengah mempersiapkan fase 2 untuk periode program 2017–2022. KSI melakukan kemitraan dengan Cakra Wikara Indonesia (CWI) sebuah lembaga riset kebijakan independen yang beranggotakan para peneliti dari Puskapol yang terlibat langsung dalam kemitraan dengan KSI di fase 1. Kemitraan KSI dan CWI merupakan kelanjutan dari kemitraan KSI dengan Puskapol di fase sebelumnya.

Di KSI fase 2, CWI bergabung dalam Aliansi Riset Kebijakan (ARK) Indonesia, yang merupakan aliansi lembaga riset mitra KSI. KSI berencana meneruskan kemitraan dengan CWI dan aliansi ini. Fasilitas yang diberikan kepada Aliansi sejalan dengan misi KSI ke depan, yaitu membangun sektor pengetahuan yang sehat melalui keempat area fokus: peningkatan kualitas penelitian dan komunikasinya, peningkatan dana penelitian, pembentukan sistem manajemen pengetahuan, dan diskursus publik.

PARA MITRA



KNOWLEDGE
SECTOR INITIATIVE



Knowledge Sector
Initiative (KSI) -
www.ksi-indonesia.org

Better Policies Better Lives

merupakan komitmen bersama pemerintah Australia dan Indonesia yang mendukung produksi pengetahuan, permintaan dan penerapan pengetahuan, perantara pengetahuan dan perkembangan sektor pengetahuan.²

Kegiatan KSI pada fase pertama diselenggarakan dengan kemitraan bersama:

1. 16 lembaga riset kebijakan termasuk Puskapol³;
2. Mitra pemerintah yaitu Bappenas; Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Aparatur Negara dan sebagainya;
3. Program KSI sendiri dijalankan oleh suatu konsorsium yang terdiri dari RTI International, The Nossal Institute for Global Health, Overseas Development Institute (ODI), dan Australian National University (ANU).



Cakra Wikara Indonesia (CWI) -
www.cakrawikara.id/.

Didirikan pada tanggal 20 Maret 2017 sebagai bentuk lembaga riset baru setelah kemitraan KSI fase 1 dengan Puskapol selesai. CWI adalah kumpulan peneliti yang sebelumnya terlibat langsung dalam kemitraan KSI dan Puskapol. CWI menekuni kajian sosial politik dengan perspektif gender untuk memproduksi pengetahuan bersama demi mendorong pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kebijakan publik. Kerja-kerja riset dan edukasi yang dilakukan di antaranya adalah: penelitian, pengumpulan dan publikasi data, serta program pelatihan dan pendidikan yang secara strategis mampu mendorong terwujudnya tata kelola politik yang partisipatif, adil dan setara.

MEMULAI KEMITRAAN

Kerja sama Australia dan Indonesia dalam sektor pengetahuan dimulai dengan mengugaskan *The Asia Foundation* (TAF) pada tahun 2010 untuk melaksanakan rangkaian inisiatif program berupa kegiatan asesmen desain penguatan kapasitas kelembagaan yang memproduksi pengetahuan. Untuk mencapai hasil yang berkesinambungan, program KSI tidak

dirancang membuat jaringan baru dalam komunitas sektor pengetahuan tetapi mendukung perkembangan dan keberlangsungan lembaga-lembaga yang sudah ada, termasuk di pusat-pusat penelitian. TAF bertugas memilih lembaga-lembaga riset kebijakan untuk mengikuti kompetisi memperoleh hibah sektor ilmu pengetahuan. TAF mengontak dan mendorong Puskapol untuk memasukkan proposal kepada Knowledge Sector (KS) untuk menjadi mitra dengan mengikuti kompetisi ini. Puskapol dipertimbangkan sebagai salah satu lembaga riset potensial karena memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan untuk menjadi mitra KSI, antara lain: kualitas penelitian, rencana strategis, *sustainability*, dan jaringan yang dimiliki.

Puskapol sendiri adalah sebuah lembaga riset berbasis universitas. Pada awal pendirian (1994-2000), aktivitas Puskapol (awalnya bernama Lab. Politik) fokus pada pengenalan lembaga dan konsolidasi internal seiring dengan pertumbuhan pusat riset/ kajian di lingkungan Universitas Indonesia. Memasuki lima tahun kedua (2001-2005), terjadi pergantian nama dari Lab Politik menjadi Puskapol yang merupakan kebijakan Universitas. Puskapol mengalami pasang surut seiring dinamika dalam Departemen Ilmu Politik sebagai induk kerja Puskapol. Periode selanjutnya (2006-2012) merupakan fase terpenting eksistensi Puskapol. Setelah terpilih sebagai mitra KSI, Puskapol memperoleh kesempatan melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, personalia, dan riset strategis.⁴

Saat itu ada 13 staf Puskapol (terdiri dari peneliti dan administrasi) yang terlibat dalam persiapan kegiatan bersama KSI. Puskapol secara resmi bermitra dengan KSI dalam periode pilot sejak 1 Januari 2012 hingga 31 Juli 2013 (“pilot project KSI” dikelola oleh TAF), periode transisi/persiapan KSI fase 1 sejak Agustus 2013 hingga 31 Januari 2014 (“bridging” KSI fase 1). Selanjutnya tahap kedua adalah periode KSI fase 1 terhitung sejak 1 Februari 2014 hingga 31 Mei 2017, sebagai kelanjutan untuk memperkuat kapasitas riset lembaga produksi pengetahuan untuk kebijakan.

MENJALANKAN KEMITRAAN

Dana inti hibah dari KSI yang diberikan untuk penguatan kelembagaan produksi pengetahuan digunakan Puskapol untuk merancang rencana strategis (renstra) yang baru pertama kalinya dibuat. Penyusunan Renstra 2012-2016 dimulai pada 2012 dengan dukungan dari KSI. Puskapol dibantu oleh Lembaga Konsultan Remdec dan Cahyo Suryanto saat proses penyusunan Renstra.⁵

Dari kegiatan asesmen program KSI diketahui berbagai permasalahan kelembagaan dalam Puskapol yang perlu dibenahi, seperti belum ada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang utuh; belum ada standar penjamin mutu untuk hasil kajian; kualitas didasarkan pada kualitas individu bukan sistemik; struktur organisasi cair sehingga menyulitkan konsolidasi Sumber Daya Manusia (SDM), beban pekerjaan menumpuk pada orang tertentu; kemampuan dasar penelitian belum merata; belum ada publikasi rutin; tidak banyak yang mengenal Puskapol karena bahan promosi terbatas; produk Puskapol belum optimal digunakan; jaringan/akses ke pengambil kebijakan masih terbatas; dan masih banyak lagi.⁶

Penyusunan Renstra berjalan secara partisipatif dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan kelompok perempuan partai politik, aktivis masyarakat sipil, perwakilan lembaga donor, staf pengajar dan peneliti Departemen Ilmu Politik UI, Manajer Riset dan Publikasi FISIP UI, dan tim Puskapol sendiri.

Dengan melibatkan staf pengajar Departemen Ilmu Politik sebagai induk Puskapol, dirumuskan analisis kelemahan, kekuatan, tantangan, dan peluang Puskapol ke depan, termasuk membenahi struktur organisasi untuk mewadahi program selama kurun waktu empat tahun ke depan.

Proses penyusunan Renstra terbagi menjadi tiga tahap. Pertama adalah penilaian kinerja organisasi. Pada tahap ini Puskapol menyerap persepsi dan opini dari para pemangku kepentingan tentang kondisi internal Puskapol, pemetaan tantangan dan peluang, serta pemetaan harapan bagi Puskapol. Pada tahap ini Puskapol menyerap aspirasi dengan melakukan studi dokumen, survei, wawancara mendalam dan diskusi berkelompok.

Tahap kedua adalah analisis isu-isu strategis. Pada tahap ini Puskapol mencoba untuk memetakan beragam isu strategis yang menjadi fokus kajian Puskapol. Dari tiap isu strategis Puskapol mendiskusikan penempatan posisi Puskapol dalam isu-isu strategis tersebut. Puskapol juga mendiskusikan dampak yang muncul dari pilihan penempatan posisi tersebut. Tahap kedua ini dijalankan dengan cara *review* dari para ahli, diskusi berkelompok dan *workshop* dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Setelah melalui dua tahap penilaian kinerja organisasi dan analisis isu-isu strategis, Puskapol melanjutkan tahap selanjutnya yaitu perumusan Renstra. Penyusunan Renstra melibatkan berbagai mitra strategis termasuk di antaranya dari pihak Rektorat UI, Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/FISIP UI, dan seluruh staf Puskapol. Perumusan Renstra dilakukan melalui lokakarya yang difasilitasi oleh KSI.

KSI menyelenggarakan lokakarya dan klinik untuk desain penelitian, pengembangan ringkasan kebijakan dan penggunaan pendekatan multi-media untuk mengomunikasikan temuan penelitian, serta pengembangan bisnis dan penggalangan dana untuk keberlanjutan kegiatan lembaga Puskapol. Bantuan teknis secara individual juga disediakan melalui peran mentor dan pelatih untuk Puskapol, khususnya bagi kegiatan utama yang termasuk dalam rencana strategis masing-masing lembaga.

TANTANGAN

KSI mendorong meningkatnya kapasitas lembaga-lembaga penelitian yang berkualitas baik dan berkelanjutan. Untuk itu KSI mengawali programnya dengan menguatkan kapasitas lembaga-lembaga penelitian yang menjadi mitranya terlebih dahulu, termasuk Puskapol. Dari kegiatan kemitraan ini diketahui bahwa Puskapol yang telah berdiri sejak 1994, belum pernah menyusun rencana strategis (*renstra*) sebelum kemitraan ini dilaksanakan.⁷

Secara internal, Puskapol sendiri memiliki tantangan saat menjalin kemitraan dengan KSI. Puskapol adalah unit terkecil dari sebuah tata kelola kelembagaan universitas, yaitu berada di bawah koordinasi Departemen Ilmu Politik UI. Konsekuensi yang di hadapi dari situasi kelembagaan tersebut adalah masalah regulasi, otonomi dan keberlangsungan. Saat menjalin kemitraan dengan KSI, Puskapol mengalami iklim perubahan internal yaitu ketika Departemen Ilmu Politik menetapkan tata cara pergantian kepemimpinan dan arah visi lembaga Puskapol pada Desember 2016. Perubahan prinsipil ini mendorong 11 orang peneliti dari Puskapol melepaskan diri dari lembaga Puskapol dan melanjutkan kerja mereka dalam wadah lembaga riset independen.⁸ Lembaga riset independen tersebut bernama CWI. Selanjutnya pada KSI fase 2, KSI melanjutkan kemitraan bersama kumpulan peneliti tersebut dalam wadah CWI.



Para peneliti CWI (saat masih dalam wadah Puskapol) bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan aparatur Desa Sepang, Buleleng, Bali saat melakukan riset penyusunan Grand Design Tata Kelola Desa. ©CWI, Mei, 2016.

Dengan melanjutkan kemitraan bersama CWI, KSI berupaya mempertahankan "investasi" yang dilakukannya selama 7 tahun terakhir kepada sekumpulan peneliti yang dulu tergabung dalam Puskapol.

HASIL

Dari hasil kemitraan ini, sejak 2012 Puskapol telah memiliki Dokumen Renstra yang disusun secara partisipatif melibatkan seluruh staf Puskapol dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian lembaga ini dapat berjalan dengan visi dan cita-cita bersama yaitu: mewujudkan tata kelola politik yang demokratis, adil, dan setara (populer disingkat TKP DAS). Visi TKP DAS membimbing Puskapol dalam menetapkan fokus kajian dan isu advokasi. Visi inilah yang menjadi penuntun kerja-kerja riset Puskapol setelah kemitraan dengan KSI dilaksanakan. Puskapol membantu mewujudkannya dengan riset-riset yang berbasis pada bukti (*evidence based research*). Puskapol memetakan fokus kajian atas dua klaster riset, yaitu representasi politik dan desentralisasi politik.

Perubahan posisi sudut pandang (paradigma) lembaga juga terjadi berkat kemitraan ini. Sebelumnya Puskapol lebih banyak menasar negara dalam kerja-kerja riset untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibuat otoritas negara seperti pemerintah, birokrasi, parlemen, dan juga partai politik. Setelah disusunnya Renstra, Puskapol mengubah posisi paradigma menjadi lebih banyak menasar masyarakat, khususnya pada pendidikan untuk memberdayakan masyarakat.⁹

Puskapol pula berhasil meluncurkan *datapolitik.org*, sebuah *database online* yang komprehensif tentang statistik dan analisis terkait dengan studi politik pada tanggal 23 Juni 2014. *Platform* ini sekaligus menjadi cerminan adanya kemajuan ke arah pendekatan budaya organisasi dalam memahami data sebagai bagian yang integral dari manajemen pengetahuan organisasi tersebut.

Hasil nyata lain dari kemitraan dengan KSI adalah wilayah kerja dan perluasan jejaring kerja dari mitra koalisi. Hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga pembuat kebijakan dan mitra koalisi diperlukan untuk mempermudah advokasi dan memperluas pemanfaatan hasil riset. Dari hasil kemitraan dengan KSI, Puskapol berhasil memperluas jejaring ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemendagri), Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes), Badan Perencanaan



Para peneliti CWI (saat masih dalam wadah Puskapol) bersama peserta workshop “Review of Asian Democracy Index Methodology” dari The Consortium for the Asian Democracy Index di FISIP UI, Depok. ©CWI, April, 2015.

Pembangunan Nasional (Bappenas) dan lain-lain. Begitu pula dengan cakupan wilayah kerja yang semakin luas, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Jayapura (Papua). Fokus kegiatan yang dilakukan pun menjadi lebih beragam, yakni penelitian/riset, penulisan rekomendasi kebijakan dalam bentuk *policy paper* berbasis riset, pelatihan, penulisan modul pelatihan berbasis riset dan survei. Berikut adalah beberapa ilustrasi kegiatan (Sektor Pengetahuan) di Puskapol yang didukung KSI: Pengembangan Kapasitas Internal Lembaga Menuju Penguatan Kapasitas Kelembagaan sebagai Lembaga Riset dengan Manajemen yang Akuntabel (2011–2014); riset “Indeks Demokrasi Asia” (2011–2016); pengembangan

Referensi

1. <http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/indo-ks-design.pdf>
2. <http://www.ksi-indonesia.org/in/pages/knowledge-sector-initiative>
3. <http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/mitra-ksi-menandatangani-kesepakatan-hibah-dana-inti>
4. <http://www.puskapol.ui.ac.id/profil-organisasi>
5. http://www.ksi-indonesia.org/file_upload/Kumpulan-Cerita-Perubahan-Terpilih-Dari-Program-Kn-06Jul2017115515.pdf dan <http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/langkah-strategis-menyusun-rencana-strategis-upaya-perbaikan-tata-kelola-lembaga-puskapol-ui>
6. Wardani, Sri Budi et. al. 2016, “Satu Dekade Puskapol UI “Beyond Projects”.
7. <http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/langkah-strategis-menyusun-rencana-strategis-upaya-perbaikan-tata-kelola-lembaga-puskapol-ui>
8. Wawancara tertulis dengan Anna Margret, Ketua CWI. 4 Oktober 2017
9. <http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/strategi-komunikasi-riset-puskapol-bergerak-dari-menyasar-negara-ke-ranah-publik>

Tentang Studi Kasus Ini

Studi kasus ini merupakan satu dari rangkaian studi kasus yang didasarkan pada presentasi dari para mitra pada sesi Forum Kemitraan. Forum Kemitraan adalah suatu kegiatan CCPHI, sebuah proyek yang didanai oleh Ford Foundation.

Studi kasus ini dibuat berdasarkan presentasi dari Whisnu Yonar, Program Manager Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Anna Margret, Ketua Cakra Wikara Indonesia (CWI) di sesi ke-35 Forum Kemitraan. Anita Kastubi mempersiapkan studi ini berdasarkan konsultasi dengan Whisnu Yonar dan Anna Margret.

Untuk informasi lainnya mengenai Proyek CCPHI dan Forum
Silakan hubungi **Dian Rosdiana**, Direktur Eksekutif, di dian.rosdiana@ccphi.org,
Ananta Gondomono, CCPHI Partnership Building Officer, di ananta.gondomono@ccphi.org,
atau **Anita Kastubi**, CCPHI Communication Officer, di anita.kastubi@ccphi.org
atau kunjungi kami di www.ccphi.org; Facebook: [CCPHI](https://www.facebook.com/CCPHI); Twitter: [@CCPHI](https://twitter.com/CCPHI); LinkedIn: [CCPHI](https://www.linkedin.com/company/ccphi)